



# RENCANA KERJA

**TAHUN 2026**

SEKRETARIAT DPRD  
PROVINSI SUMATERA BARAT



@dprdprovsumbar



@dprdsumbar



DPRD Provinsi Sumatera Barat



dprd.sumbarprov.go.id

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) merupakan perencanaan jangka pendek yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan selama 1 (satu) tahun. Renja ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada jangka menengah berupa Rencana Strategis (Renstra). Renja OPD merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya. Sesuai dengan Sesuai dengan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Organisasi Perangkat Daerah menyiapkan Renja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja ini berisikan tentang evaluasi pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah tahun lalu, isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD, tujuan dan sasaran perangkat daerah, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. Renja 2025 ini merupakan proses pembangunan 1 (satu) tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada urusan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) didasarkan kepada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.
2. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.
3. Cascading Kinerja Sekretariat DPRD sebagai salah satu hasil review internal.
4. Serta Dokumen pendukung lainnya.

Dengan disusunnya dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini, diharapkan mampu menjadikan proses pembangunan di Provinsi Sumatera Barat lebih terarah.

Padang, Mei 2025

**PIK SEKRETARIS DPRD  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**Drs. MAIFRIZON, M.Si**  
Pembina Utama Madya

NIP. 19680513 199512 1 00

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAEAH TAHUN LALU</b>	<b>10</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	41
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	44
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	50
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	60
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>61</b>
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	61
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	62
3.3 Program dan Kegiatan	64
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>75</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>82</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran tahunan dari pencapaian target pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Sedangkan dokumen Renstra Perangkat Daerah merupakan pengejawantahan dari dokumen RPJMD yang menjadi landasan bagi perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja dalam mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah terpilih.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 merupakan dokumen tahunan keenam dari penjabaran Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026. Penyusunan dokumen dimaksud menjadi landasan dalam penyusunan rancangan awal dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2026.

Renja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah tipe B dan kemudian diatur dalam Peraturan Gubernur No. 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Tugas Pokok Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah Menyelenggarakan Administrasi kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan

serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan fungsi (1) Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD, (2) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, (3) Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD dan (4) Penyediaan dan Pengoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD.

Proses Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. SK Tim Penyusunan Renja Perangkat Daerah
2. Penyusunan rancangan awal Renja dengan mempedomani Renstra, hasil evaluasi Renja tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan.
3. Penyempurnaan rancangan awal Renja dengan menelaah rancangan awal RKPD.
4. Penyusunan rancangan Renja.
5. Verifikasi rancangan Renja oleh Bappeda.
6. Forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah.
7. Perumusan rancangan akhir Renja.
8. Verifikasi rancangan akhir Renja oleh Bappeda.
9. Penyempurnaan rancangan akhir Renja.
10. Penetapan Renja.

Dokumen Renja memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, termasuk tindak lanjutnya dalam penyusunan RAPBD. Keterkaitan tersebut secara ringkas dijabarkan sebagai berikut:

1. Keterkaitan Renja SKPD dengan Dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) adalah sebagai berikut :
  - Posisi: Renja SKPD adalah penjabaran operasional tahunan dari RKPD untuk masing-masing SKPD. RKPD sendiri merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD.
  - Keterkaitan:  
Amanat RKPD: Renja SKPD harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan yang ditetapkan dalam RKPD tahun berjalan.  
Kontribusi Target: Target kinerja tahunan dalam Renja SKPD harus berkontribusi pada pencapaian target kinerja RKPD.  
Input Penyusunan: Renja SKPD menjadi salah satu input utama dalam

penyusunan RKPD, terutama dalam hal usulan program dan kegiatan dari masing-masing SKPD.

2. Keterkaitan Renja SKPD dengan Renstra Perangkat Daerah (Rencana Strategis SKPD) adalah sebagai berikut :

- Posisi: Renja SKPD adalah implementasi tahunan dari Renstra SKPD. Renstra SKPD merupakan rencana strategis 5 tahunan dari setiap SKPD yang selaras dengan RPJMD.

- Keterkaitan:

Tahapan Pencapaian : Program dan kegiatan dalam Renja SKPD merupakan tahapan tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra SKPD.

Konsistensi : Renja SKPD harus konsisten dengan arah kebijakan dan program jangka menengah yang ada dalam Renstra SKPD.

Pengukuran Kinerja : Indikator kinerja dalam Renja SKPD harus mengukur kemajuan terhadap pencapaian sasaran strategis Renstra SKPD.

3. Keterkaitan Renja SKPD dengan Renja K/L (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga) dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota (SKPD lain):

- Keterkaitan Horizontal (dengan Renja SKPD lain):

Sinergi dan Kolaborasi : Renja SKPD perlu memperhatikan dan bersinergi dengan Renja SKPD lain, terutama untuk isu-isu lintas sektoral.

Tidak Tumpang Tindih : Koordinasi antar SKPD melalui Renja masing-masing penting untuk menghindari tumpang tindih program dan kegiatan.

- Keterkaitan Vertikal (dengan Renja K/L):

Sinkronisasi Kebijakan : Renja SKPD perlu memperhatikan dan mensinkronisasikan program dan kegiatannya dengan kebijakan dan program yang ada dalam Renja K/L terkait. Ini penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas dan memanfaatkan dukungan dari tingkat atas.

Tindak Lanjut Renja SKPD dengan Proses Penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah sebagai berikut:

1. Dasar Penganggaran: Renja SKPD adalah dokumen utama yang menjadi dasar penyusunan RAPBD untuk setiap SKPD.
2. Usulan Anggaran : Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja SKPD beserta target kinerjanya akan diterjemahkan menjadi usulan anggaran dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.
3. Prioritisasi Anggaran: Dalam proses penyusunan RAPBD, program dan kegiatan dalam Renja SKPD akan diprioritaskan alokasi anggarannya sesuai dengan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang telah disepakati dengan DPRD.
4. Implementasi APBD: APBD yang telah disahkan akan menjadi landasan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renja SKPD.

Secara ringkas, Renja SKPD adalah mata rantai penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah:

1. Menerima amanat dan berkontribusi pada RPJMD.
2. Menjabarkan secara tahunan Renstra SKPD dan RKPD.
3. Berkoordinasi secara horizontal dengan Renja SKPD lain dan vertikal dengan Renja K/L.
4. Menjadi dasar penyusunan RAPBD melalui RKA SKPD.

## **1.2. Landasan Hukum**

Yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 21 ayat (3) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara nomor 4438).

3. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan terakhir Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-undang Nomor.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
6. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (lembaran negara tahun 2005 nomor 150, tambahan lembaran negara nomor 4614).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pasal 40 ayat 2 huruf j dijelaskan bahwa pada masa transisi, untuk menghindari kekosongan, seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara bagi pemerintahan kepala daerah baru terpilih selama belum ada RPJMD baru.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Kauangan Daerah
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

13. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012-2032.
15. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
16. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 45 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor ... tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor ... tahun ... tentang RKPD Tahun 2026

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 disusun dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) selanjutnya menjadi Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Propinsi Sumatera Barat tahun 2026, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan tujuan efektivitas dan efisien penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi DPRD.

Sebagai tujuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja tahun 2026 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Memberikan gambaran rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat baik yang bersifat wajib maupun pilihan sesuai urusan dan kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

2. Menetapkan indikator program/ kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatan tahun 2026.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan rencana kerja setelah diverifikasi dan disempurnakan oleh tim dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Menjadi panduan dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2026.
5. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang **(Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Timebound)** dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

##### BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

##### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

### BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan capaian Renstra Sekretariat DPRD, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

#### 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

#### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

#### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

#### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD.

### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Rencana Kerja dan pendanaan untuk tahun 2026.

## BAB V PENUTUP

Berisi uraian penutu, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**  
**PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 terdapat 2 (dua) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 80 (delapan puluh) subkegiatan. Program dan kegiatan yang ada tersebut telah dilaksanakan, namun di dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan/subkegiatan yang mencapai target kinerja, telah memenuhi target kinerja dan ada kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, baik secara fisik maupun keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi pada akhir Tahun Anggaran 2024 terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak memenuhi target yaitu di bawah 50%, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, digunakan untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur di internal perangkat daerah melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pelatihan kantor Sendiri (In House Training) serta termasuk di dalamnya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan, kegiatan ini dilakukan dengan memperhatikan jabatan dan kepentingan organisasi baik yang dilaksanakan atau diikuti oleh Perangkat Daerah dengan melibatkan peserta dari ASN di internal Perangkat Daerah. Sub kegiatan ini tidak terlaksana karena Orientasi ASN di Sekretariat DPRD tertumpu pada Pelayanan Urusan Kedewanan. Jumlah ASN yang terbatas juga berdampak kepada supporting kegiatan Kedewanan seperti Reses dan Sosialisasi Perda bahkan diikutsertakan dari Tenaga Non ASN. Ditambah jenis Diklat yang dibutuhkan sesuai tugas fungsi ASN di Sekretariat DPRD sering tidak relevan dengan ketersediaan Diklat yang ada, baik di pemprov maupun di kementerian.
2. Sub kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD digunakan untuk Penyusunan Gaji Dan Tunjangan Untuk Anggota DPRD. Sub

kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan efisiensi terhadap perjalanan dinas yang mendukung sub kegiatan ini.

3. Sub kegiatan fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau Naskah Akademik digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka memfasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau Naskah Akademik. Tidak tercapainya target dikarenakan penulisan Naskah Akademik untuk Ranperda teranggarkan 7 Naskah Akademik sedangkan terlaksana baru 3 Naskah Akademik, dan terdapat kegiatan Bimtek 1 kali yang tidak terlaksana.
4. Sub kegiatan Pembahasan APBD digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka memfasilitasi anggota DPRD untuk membahas APBD. Sub kegiatan ini tidak mencapai target dikarenakan adanya efisiensi dari rekening belanja pendukung kegiatan.
5. Sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka mengawasi Penggunaan Anggaran oleh Lembaga (DPRD). Sub kegiatan ini tidak mencapai target dikarenakan adanya efisiensi dari rekening pendukung kegiatan.
6. Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja digunakan untuk menyusun rencana kerja Anggota DPRD selama 5 tahun dengan melaksanakan perjalanan dinas oleh Anggota Dewan. Sub kegiatan ini tidak mencapai target dikarenakan terdapatnya sebagian Besar Anggota Badan Musyawarah yang tidak mengikuti kegiatan konsultasi penyusunan Renja DPRD ke Jakarta.

Terdapat juga sub kegiatan yang mencapai target baik secara anggaran maupun secara fisik. Adapun sub kegiatan yang mencapai target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah di lingkungan Sekretariat DPRD.
2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah selama 1 tahun kinerja antara lain LAKIP, LPPD dan

LKPJ, Laporan Tahunan, Laporan Pengendalian dan Evaluasi Bulanan dan Semesteran Perangkat Daerah.

3. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan Rangkaian kegiatan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja tahunan Perangkat Daerah termasuk pelaksanaan rapat-rapat internal Perangkat Daerah, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang sedang atau telah dilaksanakan, koordinasi pelaporan SIMBANGDA internal Perangkat Daerah, pengelolaan SPIP, SPAN LAPOR, IKM, Reformasi Birokrasi
4. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyediakan gaji dan tunjangan ASN di lingkungan Sekretariat DPRD.
5. Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD digunakan untuk mengakomodir kebutuhan pemeriksaan atau verifikasi berkas keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD.
6. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD di lingkungan Sekretariat DPRD.
7. Sub kegiatan pengamanan barang milik daerah SKPD digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka mengamankan barang milik daerah SKPD di lingkungan Sekretariat DPRD.
8. Sub kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD digunakan untuk mengakomodir kegiatan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.
9. Sub kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka pencatatan dan pelaporan barang milik daerah SKPD di lingkungan Sekretariat DPRD.
10. Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang digunakan untuk pembelian pakaian dinas beserta atribut kelengkapan bagi ASN yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban pegawai dalam berpakaian dinas sesuai aturan yang berlaku. Jenis pakaian dinas yang bisa diadakan adalah PDH warna khaki, PDH kemeja

putih, celana/rok hitam dan PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah) sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah) dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tertib Kedinasan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

11. Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyediakan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dilingkungan Sekretariat DPRD.
12. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor dilingkungan Sekretariat DPRD.
13. Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyediakan peralatan rumah tangga dilingkungan Sekretariat DPRD.
14. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyediakan bahan logistik kantor dilingkungan Sekretariat DPRD.
15. Sub kegiatan barang cetakan dan penggandaan digunakan untuk mengakomodir pengadaan barang cetak dan penggandaan di lingkungan Sekretariat DPRD.
16. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dilingkungan Sekretariat DPRD.
17. Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka memfasilitasi kunjungan tamu dilingkungan Sekretariat DPRD.
18. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyelenggarakan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dilingkungan Sekretariat DPRD.

19. Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka penatausahaan arsip dinamis pada SKPD dilingkungan Sekretariat DPRD.
20. Sub kegiatan pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya digunakan untuk mengakomodir kegiatan pembangunan Gedung kantor dan bangunan lainnya di Sekretariat DPRD.
21. Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya digunakan untuk mengakomodir kegiatan pengadaan sarana Gedung kantor sebagai alat penunjang kinerja pegawai Sekretariat DPRD.
22. Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya digunakan untuk mengakomodir kegiatan pengadaan sarana pendukung Gedung kantor sebagai alat penunjang kinerja pegawai Sekretariat DPRD.
23. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyediakan jasa surat menyurat dilingkungan Sekretariat DPRD.
24. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyediakan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dilingkungan Sekretariat DPRD.
25. Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyediakan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dilingkungan Sekretariat DPRD.
26. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyediakan jasa pelayanan umum kantor dilingkungan Sekretariat DPRD.
27. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan digunakan untuk menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Kendaraan dinas Jabatan yang dimaksud yakni Kendaraan dinas yang dipergunakan oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah (tidak termasuk Kepala Perangkat Daerah).

28. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyediakan jasa pemeliharaan, biasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
29. Sub kegiatan pemeliharaan mebel Digunakan untuk menyediakan pemeliharaan Mebel dan juga untuk pemeliharaan peralatan rumah tangga yang masuk dalam kategori mebel.
30. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya digunakan untuk menyediakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan juga untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang masuk kategori Peralatan dan Mesin lainnya dan dapat juga digunakan untuk pengadaan peralatan olahraga
31. Sub kegiatan pemeliharaan/rahbilitasi Gedung kantor atau bangunan lainnya digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka memelihara/merehabilitasi Gedung kantor atau bangunan lainnya.
32. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka memelihara/merehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
33. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka memelihara/merehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
34. Sub kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD.
35. Sub kegiatan penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyediakan pakaian dinas dan atribut DPRD.
36. Sub kegiatan pelaksanaan medical chek up DPRD digunakan untuk mengakomodir chek kesehatan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
37. Sub Kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD, kegiatan untuk mendukung secara penuh kegiatan-kegiatan pada masing-masing Fraksi DPRD.

38. Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD digunakan untuk mendukung Kebutuhan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
39. Sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyediakan kebutuhan rumah tangga DPRD.
40. Sub kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyusun dan membahas program pembentukan peraturan daerah sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.
41. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka membahas rancangan perda oleh anggota DPRD.
42. Sub kegiatan penyelenggaraan kajian perundang-undangan digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyelenggarakan kajian perundang-undangan.
43. Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah digunakan untuk melakukan sosialisasi Perda oleh anggota DPRD.
44. Sub kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka membahas KUA dan PPAS oleh anggota DPRD.
45. Sub kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan perubahan PPAS digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka memfasilitasi anggota DPRD dalam melaksanakan Pembahasan Perubahan KUA dan perubahan PPAS.
46. Sub kegiatan Pembahasan Perubahan APBD digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka memfasilitasi anggota DPRD dalam melaksanakan Pembahasan Perubahan APBD.
47. Sub kegiatan Pembahasan Laporan Semester digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka membahas laporan semesteran oleh Anggota DPRD.
48. Sub kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka membahas Pertanggungjawaban APBD oleh anggota DPRD.

49. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka memfasilitasi anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum.
50. Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka memfasilitasi anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur.
51. Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka memfasilitasi anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat.
52. Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka mengawasi Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian.
53. Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka memfasilitasi anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam.
54. Sub kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka mengawasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
55. Sub kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah digunakan untuk memfasilitasi laporan keuangan daerah.
56. Sub kegiatan Pendalaman Tugas DPRD, digunakan untuk fasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Anggota DPRD.
57. Sub kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyediakan Kelompok Pakar dan Tim Ahli untuk pimpinan dan anggota DPRD.
58. Sub kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyediakan Tenaga Ahli Fraksi.

59. Sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama dengan masyarakat atau pihak lain.
60. Sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka mempublikasikan dan mendokumentasikan dewan.
61. Sub kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka kunjungan kerja dalam daerah oleh anggota DPRD.
62. Sub kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyusun pokok-pokok pikiran DPRD.
63. Sub kegiatan Pelaksanaan Reses digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka melaksanakan Reses pimpinan dan anggota DPRD.
64. Sub kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka menyusun kode etik DPRD.
65. Sub kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka mengawasi Kode Etik DPRD.
66. Sub kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD digunakan untuk mengakomodir kegiatan kedinasan anggota DPRD.
67. Sub kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD digunakan untuk mengakomodir penyusunan laporan kinerja DPRD.
68. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah, digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka memfasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah.
69. Sub kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka memfasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.
70. Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus digunakan untuk mengakomodir kebutuhan dalam rangka memfasilitasi Tugas Panitia Khusus.

Adapun rincian terhadap pencapaian target di atas dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2024**

NO	Kode Rekening	Uraian	Pagu	Realisasi		
				Fisik	Keuangan	
					%	Nilai (Rp.)
		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>219.269.612.845,00</b>	<b>99,40</b>	<b>194.731.270.011,16</b>	<b>88,81</b>
<b>1</b>	<b>4,02,01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>127.463.578.147,00</b>	<b>99,98</b>	<b>123.094.148.646,16</b>	<b>96,57</b>
<b>1,1</b>	<b>4.02.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>696.337.900,00</b>	<b>100</b>	<b>665.383.850,00</b>	<b>95,55</b>
1.1.1	4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	311.120.000,00	100	305.171.850,00	98,09
1.1.2	4.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	263.070.000,00	100	253.015.600,00	96,18
1.1.2	4.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.147.900,00	100	107.196.400,00	87,76
<b>1,2</b>	<b>4.02.01.1.02</b>	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>13.295.705.335,00</b>	<b>100</b>	<b>12.396.462.361,00</b>	<b>93,24</b>
1.2.1	4.02.01.1.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	11.712.077.135,00	100	10.854.294.161,00	92,68
1.2.3	4.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.238.685.300,00	100	1.208.993.500,00	97,60
1.2.4	4.02.01.1.02.07	Koordinasi dan penyusutan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	344.942.900,00	100	333.174.700,00	96,59
<b>1,3</b>	<b>4.02.01.1.03</b>	<b>Administrasi barang milik daerah parda perangkat daerah</b>	<b>1.065.592.587,00</b>	<b>100</b>	<b>1.054.214.786,00</b>	<b>98,93</b>
1.3.1	4.02.01.1.03.06	penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	45.029.595,00	100	45.029.595,00	100,00
1.3.2	4.02.01.1.03.02	Pengamanan barang milik daerah SKPD	467.733.492,00	100	464.632.911,00	99,34
1.3.3	4.02.01.1.03.04	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	552.829.500,00	100	544.552.280,00	98,50
<b>1,4</b>	<b>4.02.01.1.05</b>	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>333.808.000,00</b>	<b>91,42</b>	<b>298.000.000,00</b>	<b>89,27</b>
1.4.1	4.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	298.000.000,00	100	298.000.000,00	100,00
1.4.2	4.02.01.1.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	35.808.000,00	20	0,00	0,00
<b>1,5</b>	<b>4.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>11.520.493.493,00</b>	<b>100</b>	<b>10.644.332.382,00</b>	<b>92,39</b>
1.5.2	4.02.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	152.859.280,00	100	150.691.600,00	98,58
1.5.3	4.02.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	325.604.825,00	100	312.830.000,00	96,08

NO	Kode Rekening	Uraian	Pagu	Realisasi		
				Fisik	Keuangan	
					%	Nilai (Rp.)
1.5.4	4.02.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	2.543.444.826,00	100	2.502.764.100,00	98,40
1.5.5	4.02.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	1.618.899.512,00	100	1.335.305.156,00	82,48
1.5.6	4.02.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1.217.768.750,00	100	987.693.149,00	81,11
1.5.7	4.02.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	768.825.000,00	100	720.807.000,00	93,75
1.5.7	4.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.698.520.000,00	100	1.501.152.000,00	88,38
1.5.8	4.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2.383.656.000,00	100	2.382.647.277,00	99,96
1.5.9	4.02.01.1.06.10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	107.234.300,00	100	104.593.100,00	97,54
1.5.9	4.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	703.681.000,00	100	645.849.000,00	91,78
<b>1,6</b>	<b>4.02.01.1.07</b>	<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>19.060.435.403,00</b>	<b>100</b>	<b>18.983.265.986,00</b>	<b>99,60</b>
1.6.1	4.02.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan	660.900.000,00	100	660.900.000,00	100,00
1.6.2	4.02.01.1.07.05	Pengadaan mebel	837.056.903,00	100	834.898.780,00	99,74
1.6.3	4.02.01.1.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	995.218.600,00	100	995.000.000,00	99,98
1.6.4	4.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.200.000,00	100	66.384.700,00	77,92
1.6.5	4.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.022.439.900,00	100	9.000.235.656,00	99,75
1.6.5	4.02.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.459.620.000,00	100	7.425.846.850,00	99,55
<b>1,7</b>	<b>4.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>13.980.532.343,00</b>	<b>100</b>	<b>13.577.307.493,62</b>	<b>97,12</b>
1.7.1	4.02.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	140.430.700,00	100	139.245.400,00	99,16
1.7.2	4.02.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.858.485.200,00	100	2.618.744.203,00	91,61
1.7.3	4.02.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2.079.810.458,00	100	2.005.958.111,00	96,45
1.7.4	4.02.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	8.901.805.985,00	100	8.813.359.779,62	99,01
<b>1,8</b>	<b>4.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>23.632.536.249,00</b>	<b>100</b>	<b>21.850.888.815,54</b>	<b>92,46</b>
1.8.1	4.02.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	152.571.000,00	100	142.616.524,00	93,48
1.8.2	4.02.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,	977.843.100,00	100	938.147.076,00	95,94

NO	Kode Rekening	Uraian	Pagu	Realisasi		
				Fisik	Keuangan	
				%	Nilai (Rp.)	%
		pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				
1.8.3	4.02.01.1.09.05	Pemeliharaan mebel	333.000.000,00	100	314.585.000,00	94,47
1.8.4	4.02.01.1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	109.390.000,00	100	76.027.950,00	69,50
1.8.5	4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	16.105.034.039,00	100	15.426.957.749,73	95,79
1.8.6	4.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.792.942.110,00	100	4.267.376.980,00	89,03
1.8.7	4.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1.161.756.000,00	100	685.177.535,81	58,98
<b>1,9</b>	<b>4.02.01.1.15</b>	<b>Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD</b>	<b>43.150.554.441,00</b>	<b>100</b>	<b>42.988.774.530,00</b>	<b>99,63</b>
1.9.1	4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	41.263.890.441,00	100	41.137.622.530,00	99,69
1.9.2	4.02.01.1.15.03	Pelaksanaan medical check up DPRD	1.831.764.000,00	100	1.796.360.000,00	98,07
1.9.3	4.02.01.1.15.02	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	54.900.000,00	100	54.792.000,00	99,80
<b>1,1</b>	<b>4.02.01.1.16</b>	<b>Layanan administrasi DPRD</b>	<b>727.582.396,00</b>	<b>100</b>	<b>635.518.442,00</b>	<b>87,35</b>
1.10.1	4.02.01.1.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	0,00	100	0,00	0,00
1.10.1	4.02.01.1.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	95.160.000,00	100	94.950.000,00	99,78
1.10.2	4.02.01.1.16.03	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	143.400.000,00	100	143.376.000,00	99,98
1.10.3	4.02.01.1.16.04	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	489.022.396,00	100	397.192.442,00	81,22
<b>2</b>	<b>4,02,02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>91.806.034.698,00</b>	<b>98,59</b>	<b>71.637.121.365,00</b>	<b>78,03</b>
<b>2,1</b>	<b>4.02.02.1.01</b>	<b>Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>	<b>23.370.562.700,00</b>	<b>95</b>	<b>15.239.721.807,00</b>	<b>65,21</b>
2.1.1	4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.206.849.000,00	95	653.406.382,00	54,14
2.1.2	4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	6.627.657.200,00	95	3.903.289.192,00	58,89
2.1.3	4.02.02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	339.778.000,00	95	276.625.674,00	81,41
2.1.4	4.02.02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	421.049.000,00	95	204.261.300,00	48,51
2.1.5	4.02.02.1.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	14.775.229.500,00	95	10.202.139.259,00	69,05
<b>2,2</b>	<b>4.02.02.1.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>4.575.335.700,00</b>	<b>100</b>	<b>3.444.617.638,00</b>	<b>75,29</b>
2.2.1	4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	880.075.400,00	100	835.649.969,00	94,95
2.2.2	4.02.02.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	92.017.500,00	100	75.446.300,00	81,99

NO	Kode Rekening	Uraian	Pagu	Realisasi		
				Fisik	Keuangan	
				%	Nilai (Rp.)	%
2.2.3	4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	1.549.117.900,00	100	669.129.262,00	43,19
2.2.4	4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	1.197.898.800,00	95	1.101.824.478,00	91,98
2.2.5	4.02.02.1.02.05	Pembahasan Laporan Semester	6.958.300,00	100	3.847.000,00	55,29
2.2.6	4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	849.267.800,00	100	758.720.629,00	89,34
<b>2,3</b>	<b>4.02.02.1.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>10.021.473.900,00</b>	<b>100</b>	<b>7.242.225.176,00</b>	<b>72,27</b>
2.3.1	4.02.02.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.764.827.600,00	100	1.275.625.500,00	72,28
2.3.2	4.02.02.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.911.829.600,00	100	1.406.953.500,00	73,59
2.3.3	4.02.02.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.994.321.700,00	100	1.362.821.500,00	68,34
2.3.4	4.02.02.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.992.757.900,00	100	1.427.635.200,00	71,64
2.3.5	4.02.02.1.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1.645.392.600,00	100	1.261.768.700,00	76,68
2.3.6	4.02.02.1.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	151.919.400,00	100	29.764.400,00	19,59
2.3.7	4.02.02.1.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	63.262.300,00	100	4.562.300,00	7,21
2.3.8	4.02.02.1.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	497.162.800,00	100	473.094.076,00	95,16
<b>2,4</b>	<b>4.02.02.1.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>15.637.019.158,00</b>	<b>89,91</b>	<b>13.991.957.446,00</b>	<b>89,48</b>
2.4.1	4.02.02.1.04.01	Orientasi DPRD	1.534.625.798,00	100	997.898.180,00	65,03
2.4.2	4.02.02.1.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	2.910.320.400,00	100	2.657.388.044,00	91,31
2.4.3	4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.045.475.960,00	85,5	2.034.293.063,00	99,45
2.4.4	4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli	501.657.800,00	100	448.577.000,00	89,42
2.4.3	4.02.02.1.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	439.885.000,00	85,5	190.461.210,00	43,30
2.4.4	4.02.02.1.04.08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	8.205.054.200,00	100	7.663.339.949,00	93,40
<b>2,5</b>	<b>4.02.02.1.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>11.014.689.350,00</b>	<b>100</b>	<b>9.664.292.240,00</b>	<b>87,74</b>
2.5.1	4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	2.900.700,00	0	2.900.700,00	100,00
2.5.2	4.02.02.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	8.561.200,00	100	7.627.200,00	89,09
2.5.3	4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	11.003.227.450,00	100	9.653.764.340,00	87,74
<b>2,6</b>	<b>4.02.02.1.06</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>378.101.400,00</b>	<b>100</b>	<b>357.430.843,00</b>	<b>94,53</b>
2.6.1	4.02.02.1.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	236.864.600,00	100	231.697.000,00	97,82
2.6.2	4.02.02.1.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	141.236.800,00	100	125.733.843,00	89,02
<b>2,7</b>	<b>4.02.02.1.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>26.808.852.490,00</b>	<b>100</b>	<b>21.696.876.215,00</b>	<b>80,93</b>

NO	Kode Rekening	Uraian	Pagu	Realisasi		
				Fisik	Keuangan	
				%	Nilai (Rp.)	%
2.7.1	4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	18.578.908.746,00	100	14.577.730.510,00	78,46
2.7.1	4.02.02.1.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	263.670.400,00	100	248.881.450,00	94,39
2.7.2	4.02.02.1.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.790.757.344,00	100	1.434.548.951,00	80,11
2.7.3	4.02.02.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4.201.436.000,00	100	3.481.566.747,00	82,87
2.7.4	4.02.02.1.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1.974.080.000,00	100	1.954.148.557,00	98,99

Dari pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat seperti yang telah diinformasikan di atas ada yang memenuhi target ada yang tidak memenuhi target disebabkan karena belum terencanaanya program dan kegiatan dengan baik sehingga belum dapat terealisasi sesuai dengan yang diharapkan.

Akibat yang timbul dari program-program yang tidak memenuhi target mengakibatkan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra tidak tercapai dan rencana yang sudah ditetapkan dalam Renstra tidak dapat terlaksana dengan baik dan perencanaan yang sudah ditetapkan menjadi sia-sia.

Untuk mengantisipasi hal tersebut ke depan Sekretariat akan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menyusun Rencana Kerja dan apabila dirasa tidak mungkin dapat terlaksana alangkah baiknya program dan kegiatan tersebut tidak dimunculkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Untuk melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat dilihat dalam Tabel T.C.29, pada tabel T.C.29 masing-masing kegiatan sudah dicantumkan target dari masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018.

**TABEL T.C.29**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024  
Provinsi Sumatera Barat**

NAMA OPD : SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10	11	12
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat yang tepat sasaran selama 1 tahun	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran biaya telepon, air, listrik dan kawat / faksimili / internet / VPN untuk 1 tahun	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pembayaran PBB dan premi asuransi untuk 1 tahun	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor	Pembayaran retribusi sampah dan jasa cleaning service untuk 1 tahun, Pembayaran honorarium sopir kantor sebanyak 12 orang, Pembayaran honorarium satpam kantor sebanyak 22 orang	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Medical check-up Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 65 orang	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK Sekretariat DPRD selama 12 bulan	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetak dan penggandaan selama 12 bulan	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10	11	12
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik dan elektronik untuk 1 tahun	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Pengadaan peralatan / perlengkapan pakai habis dan tabung gas 5 unit	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar / majalah dan buku sebanyak 126 eksemplar	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan minum / snack rapat DPRD dan Sekretariat DPRD untuk 1 tahun	13 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	10 paket	13 paket	13 paket	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah selama 1 tahun	laporan dalam daerah 200 buah, luar daerah 124 buah	laporan dalam daerah 200 buah, luar daerah 124 buah	laporan dalam daerah 200 buah, luar daerah 124 buah	laporan dalam daerah 200 buah, luar daerah 124 buah	laporan dalam daerah 200 buah, luar daerah 124 buah	laporan dalam daerah 200 buah, luar daerah 124 buah	laporan dalam daerah 200 buah, luar daerah 124 buah	laporan dalam daerah 200 buah, luar daerah 124 buah	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Terlaksananya honorarium instruktur senam, pembaca doa / al quran dan penceramah selama 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
	Pengelolaan dan pendataan Dokumen Arsip OPD	Pendataan arsip aktif dan pasif DPRD dan Sekretariat DPRD untuk 1 tahun	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembayaran retribusi sampah dan jasa cleaning service untuk 1 tahun	1 thn	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 thn	1 thn	
	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Pembayaran honorarium sopir kantor sebanyak 12 orang	1 thn	1 tahun					1 thn	1 thn	
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Pembayaran honorarium satpam kantor sebanyak 22 orang	1 thn	1 tahun					1 thn	1 thn	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tesedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	1 thn	10 macam					1 thn	1 thn	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur, kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik</b>									
	Pembangunan Gedung Kantor	1 unit gedung kantor	1	0.3	0.7	0.7	0.7	0.0	0.3	1	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan kendaraan roda empat 4 unit	4 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	4 unit	4 unit	
	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Peralatan / perlengkapan pakai habis, lemari dinding, tempat tidur	3 paket	9 paket	9 paket	9 paket	9 paket	9 paket	3 paket	3 paket	
	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	Laptop, PC, Scanner, Printer Photo, Printer, Kamera Shoting, Kamera Tustel, Handycam, CD Player,	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn			

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10	11	12
		Televisi, Alat Fitnes, Alat Musik									
	Pengadaan mebeleur	Alat kantor dan Alat Rumah Tangga	9 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	9 paket	9 paket	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess	Terpeliharanya bangunan rumah dinas dan mess untuk 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor selama 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan DPRD selama 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan roda empat, kendaraan roda enam dan sepeda motor selama 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10	11	12
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas/Mess	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan instalasi dan jaringan rumah dinas dan mess untuk 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
	Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur	Pemeliharaan meubeleur selama 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan peralatan studio, komunikasi dan informasi selama 1 tahun, Penggantian suku cadang dan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun, Pemeliharaan komputer, laptop, printer dan jaringan dan perlengkapan komputer selama 1 tahun	1 tahun	1 thn					1 tahun	1 tahun	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10	11	12
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Pemeliharaan instalasi dan jaringan gedung kantor untuk 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
	Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas/jabatan/mess	Terlaksananya rehabilitasi sedang dan berat rumah dinas / rumah jabatan	1 unit	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	
	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang dan berat gedung kantor	1 unit	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	1 thn	
	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	UPS, Laptop, PC dan printer 10 unit	1 tahun	4 paket					1 tahun	1 tahun	
	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Pengadaan infocus, kamera, handycam dan conference system 1 unit	1 tahun	4 paket					1 tahun	1 tahun	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Pemeliharaan peralatan studio, komunikasi dan informasi selama 1 tahun	1 tahun	1 tahun					1 tahun	1 tahun	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10	11	12
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penggantian suku cadang dan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun			
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Pemeliharaan komputer, laptop, printer dan jaringan dan perlengkapan komputer selama 1 tahun	1 tahun	1 tahun					1 tahun	1 tahun	
	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset OPD	Honor pejabat pengadaan, pengelola asset untuk 12 bulan, biaya cetak dan penggandaan laporan asset dan koordinasi tentang asset	1 tahun	1 tahun					1 tahun	1 tahun	
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10	11	12
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas untuk Anggota DPRD dan pegawai 130 orang	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	
	Peresmian Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2020- 2024		0								
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat</b>									
	Sosialisasi Peraturan dan Perundang- undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam daerah dan luar daerah	12 kali	10 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	12 kali	12 kali	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan teknis dalam daerah dan luar daerah	10 kali	24 orang	24 orang	24 orang	24 orang	24 orang	10 kali	10 kali	
	Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Peningkatan wawasan untuk 4 bagian pada Sekretariat DPRD	0	4 bagian							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10	11	12
	Pelatihan Kantor Sendiri	Terlaksananya pelatihan pegawai Sekretariat DPRD untuk 50 orang	0	50 orang							
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja OPD, nilai evaluasi SAKIP, tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan</b>									
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersedianya laporan keuangan OPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	
	Penatausahaan Keuangan OPD	Terlaksananya penatausahaan keuangan OPD untuk 1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		8 = ( 7 / 6 )	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10	11	12
	Penyusunan Perencanaan dan Panganggaran OPD	Tersusunnya Renja tahunan dalam bentuk APBD murni, APBD Pergeseran dan APBD Perubahan	1 tahun	3 dokumen							
	<b>Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset</b>	<b>Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra, persentase kesesuaian Renja dengan RPJMD dan pengendalian asset OPD</b>									
	Penyusunan Perencanaan dan Panganggaran OPD	Tersusunnya Renja tahunan dalam bentuk APBD murni, APBD Pergeseran dan APBD Perubahan	1 tahun								
	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset OPD	Honor pejabat pengadaan, pengelola asset untuk 12 bulan, biaya cetak dan penggandaan laporan	1 tahun								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10	11	12
		asset dan koordinasi tentang asset									
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan</b>	<b>Persentase koordinasi dengan Kabupaten / Kota</b>									
	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemerintah Daerah	Terlaksananya pelayanan tamu koordinasi dengan Pemerintah Daerah	1 tahun								
	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>Terlaksananya studi banding antar provinsi</b>									
	Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Peningkatan wawasan untuk 4 bagian pada Sekretariat DPRD	1 tahun								
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>Terlaksananya pemahaman dan penetapan rancangan APBD tepat waktu, jumlah perda yang disetujui, jumlah rekomendasi yang</b>									

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10	11	12
		diberikan DPRD untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah									
	Pembahasan Rancangan Perda	Terlaksananya penetapan Perda / Keputusan DPRD	22 Ranperda / 38 Keputusan DPRD	19 Ranperda, 2 KUA/PPAS, 5 Pansus, 1 Prolegda	19 Ranperda, 2 KUA/PPAS, 5 Pansus, 1 Prolegda	19 Ranperda, 2 KUA/PPAS, 5 Pansus, 1 Prolegda	19 Ranperda, 2 KUA/PPAS, 5 Pansus, 1 Prolegda	19 Ranperda, 2 KUA/PPAS, 5 Pansus, 1 Prolegda	20 Ranperda / Keputusan DPRD	20 Ranperda / Keputusan DPRD	
	Reses	Terlaksananya reses perorangan dan reses kelompok	3 reses	3 reses	3 reses	3 reses	3 reses	3 reses	3 reses	3 reses	
	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Terwujudnya kunjungan kerja Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	20 kali	
	Peningkatan Kapasitas Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD	Terlaksananya workshop	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10	11	12
	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi ranperda dan keputusan DPRD kepada masyarakat dan Pemda Kabupaten / Kota se-Sumbar	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	
	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen publikasi	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	
	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang- undangan	Terlaksananya koordinasi dengan Kabupaten / Kota	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	
	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang- undangan yang lebih Tinggi, Keserasian Peranan Per UU	Tersusunnya laporan hasil kajian	2 kajian	2 kajian	2 kajian	2 kajian	2 kajian	2 kajian	2 kajian	2 kajian	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Ket
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = ( 7 / 6 )	9	10	11	12
	Seminar dalam rangka Pembahasan Ranperda	Tersusunnya laporan / rekomendasi pelaksanaan seminar	2 keg	5 keg	5 keg	5 keg	5 keg	5 keg	2 keg	2 keg	
	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Terlaksananya kunjungan kerja Pimpinan, Anggota dan Sekretaris DPRD dalam daerah	1 tahun	laporan 12 keg, 19 kab/kota					1 tahun	1 tahun	
	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi ke luar Daerah	Terwujudnya peningkatan wawasan dan kinerja DPRD	3 masa sidang	6 keg					3 masa sidang	3 masa sidang	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Pemda	Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Daerah	1 tahun	1 tahun					1 tahun	1 tahun	

Sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya melalui Kepmendagri nomor 050, untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2026, menggunakan pola yang sama dengan pola tahun 2024. Setiap sub kegiatan telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan aturan tersebut di atas. Melalui kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, menetapkan bahwa terdapat klasifikasi subkegiatan yang harus, dapat, tidak dapat digunakan oleh organisasi. Dengan demikian beberapa sub kegiatan baru akan muncul di dalam pelaksanaan anggaran tahun 2026. Sisi lain dari kewenangan tersebut adalah untuk menyeragamkan Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi sebagai inti dari pelaksanaan anggaran internal masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran dan aliran kas pada program dan kegiatan ini Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan capaian kegiatan di bawah 95%.

Untuk Program dan Kegiatan tahun 2026 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk melaksanakannya seoptimal mungkin dengan capaian kinerja masing-masing program dan kegiatan perkiraan mencapai 100 %, dengan batas minimal 95 % sesuai dengan perjanjian kinerja Kepala OPD dengan Gubernur Sumatera Barat. Untuk tahun 2025 Sekretariat DPRD memfokuskan pada kegiatan-kegiatan dengan anggaran porsi terbesar sehingga dapat memenuhi target baik fisik maupun keuangan dengan artian tetap memperhatikan program dan kegiatan lainnya.

Berdasarkan pencapaian tahun 2024, secara global target fisik dan target keuangan kegiatan sudah tercapai, namun ada beberapa kegiatan yang tidak tercapai, termasuk di dalamnya program pokok kegiatan. Tidak tercapainya target keuangan masing-masing kegiatan dapat dipahami karena beberapa alasan logis seperti peran penggunaan dan optimalisasi keuangan bergantung kepada aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pemangku kepentingan. Sekretariat dalam hal ini selalu mengedepankan pelayanan terbaik, karena fungsi utama sekretariat sejalan dengan Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Tugas Pokok Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah Menyelenggarakan Administrasi kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD; dan
4. Penyediaan dan Pengoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD.

Untuk tahun 2026 diperkirakan target yang ditetapkan dapat tercapai. Evaluasi dan pengendalian mendalam dilakukan terhadap beberapa kegiatan yang tidak mencapai target keuangan pada tahun 2024. Evaluasi dilakukan dalam bentuk mencari solusi atas masalah yang akan terjadi mengacu kepada kegiatan tahun 2024. Sedangkan pengendalian dilakukan melalui pengetatan aliran kas dari per tiga bulan menjadi per bulan, hal tersebut dirasa efektif untuk mematangkan target agar sesuai dengan perencanaan.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD**

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap tugas dan fungsi Dewan sesuai SOP, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu Pelaksanaan Program Nasional yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu Program yang menyangkut dengan Program Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan beberapa kegiatan. Jenis Indikator yang dikaji sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan standar Operasional Prosedur (SOP) sudah mengacu pada PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD dan dijabarkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur dukungan staf memfasilitasi DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik sebagai fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi

pengawasan, maka tolok ukur kinerja Sekretariat DPRD adalah ditandai dengan terlaksananya fungsi DPRD sesuai dengan Program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam Rencana Kerja tahun 2026 ini Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah memiliki tolok ukur dan Indikator Kinerja yang akan diuji yaitu Tolok ukur pertama adalah Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan yang ditandai dengan indikator indeks kepuasan pemangku kepentingan dengan pelaksanaan pengukuran menggunakan formula tertentu dan akan menghasilkan skor sesuai dengan atau di atas target yang telah ditetapkan. Tolok ukur kedua adalah Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang diberikan oleh tim penilai dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, dan kemudian adalah tolok ukur ketiga yakni Realisasi Keuangan yang mencapai target sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Gubernur dengan Sekretaris DPRD. Ketiga tolok ukur ini menjadi indikator kepada Sekretariat DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur no. 45 tahun 2018.

Untuk Capaian target Renstra Sekretariat DPRD dengan realisasi Rencana Kerja tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel T.C.30, pada tabel tersebut dapat dilihat capaian target Renstra dengan Realisasi Rencana Kerja tahun sebelumnya, pada tabel ini Sekretariat DPRD menampilkan target Renstra Tahun 2021 dengan realisasi tahun 2024 dan perkiraan capaian pada tahun 2026.

Tabel T.C.30

## Capaian Target Renstra Sekretariat DPRD dengan Renja Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR	SPM / STANDA R NASION AL	IKK (PP 6/2008)	TARGET RENSTRA OPD					REALISASI CAPAIAN					PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2020 (thn n-1)	TAHUN 2021 (thn n-2)	TAHUN 2022 (thn n-3)	TAHUN 2023 (thn n-4)	TAHUN 2024 (thn n-5)	TAHUN 2020 (thn n-1)	TAHUN 2021 (thn n-2)	TAHUN 2022 (thn n-3)	TAHUN 2023 (thn n-4)	TAHUN 2024 (thn n-5)	TAHUN 2025 (thn n)	TAHUN 2026 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Indeks Kepuasan Kepada Pemangku Kepentingan			90	90	90	90	90	90,65	90,96	91,05	90,15	91,34	91,34	91,50	

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD**

Permendagri nomor 104 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, kemudian Peraturan Gubernur nomor 45 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Gubernur nomor 55 tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadikan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berada pada struktur organisasi dengan tipe B. Dengan struktur organisasi tipe B, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari tiga bagian dengan masing-masing tiga subbagian. Pembagian tersebut bisa dianalisis bahwa sesuai dengan Permendagri 104 tahun 2016 Sekretariat DPRD lebih memperkuat fungsi dan tugas pokok sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada Pemangku Kepentingan dalam hal ini adalah Anggota DPRD yang terdiri dari unsur pimpinan dan anggota DPRD.

#### 1. Tingkat Pelayanan kinerja OPD.

Dalam menyelenggarakan tugas dan pokok Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada paragraf 2 Pasal 9 (5), dimana Sekretariat DPRD melaksanakan fungsinya sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD provinsi;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD provinsi;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD provinsi; dan
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi.

Fungsi tersebut diatas akan dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD sebagai pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD yang akan dijabarkan oleh masing-masing bagian di Sekretariat DPRD.

Antara Sekretariat DPRD Provinsi dengan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota serta DPR RI harus bersinergi untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan berjalan efektif dan efisien. Sekretariat DPRD Provinsi memiliki peran penting dalam mendukung tugas DPRD dalam membuat peraturan daerah, mengawasi pelaksanaan APBD, dan menyelenggarakan administrasi kesekretariatan. DPRD Kabupaten/Kota

juga memiliki tugas serupa, tetapi pada skala yang lebih lokal. DPR RI sebagai lembaga legislatif tingkat pusat berperan dalam membuat undang-undang yang menjadi dasar bagi peraturan daerah.

Berikut adalah beberapa aspek sinergi yang penting:

a. Koordinasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah :

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dalam menyusun rancangan peraturan daerah yang relevan, memastikan bahwa peraturan daerah tersebut selaras dengan kebijakan pusat yang ditetapkan DPR RI.

b. Pengawasan Pelaksanaan APBD :

Sekretariat DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat membantu DPRD dalam mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara efisien dan efektif.

c. Penyusunan RUU dan Raperda :

DPR RI dapat berkoordinasi dengan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk menyusun undang-undang dan peraturan daerah yang lebih komprehensif dan terintegrasi, sehingga dapat mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

d. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD :

Sekretariat DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat membantu DPRD dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, seperti rapat, seminar, dan studi banding.

e. Koordinasi dalam Pengawasan APBD :

Sekretariat DPRD dapat membantu DPRD dalam pengawasan pelaksanaan APBD, termasuk koordinasi dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan instansi terkait lainnya.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD.

a. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.

- b. Masih lemahnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integritas, sinkronisasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga Pemerintahan Daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya termasuk LMS.
  - c. Masih rendahnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
  - d. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan kesekretariatan DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.
  - e. Masih lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya.
  - f. Seringnya terjadi perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.
  - g. Peningkatan hubungan yang harmonis dengan DPRD untuk mewujudkan pelayanan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara dinamis dan demokratis.
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah.

Dari kondisi yang kami kemukakan di atas dengan memanfaatkan peluang yang ada serta memaksimalkan staf yang ada hal ini tidak berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026; dimana Visi Pembangunan Sumatera Barat yang ingin diwujudkan pada periode 2021–2026 adalah **TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN**. Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021–2026 merupakan salah satu OPD pelaksana Misi Ke Tujuh yaitu: **“Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas”** dengan tujuan berupa terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani. Adapun Sekretariat DPRD akan berkontribusi pada sasaran (i) terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan sasaran (iii) meningkatnya kualitas pelayanan public yang akan dilaksanakan melalui program–program OPD Sekretariat DPRD Provinsi

Sumatera Barat mengacu kepada Permendagri nomor 90 tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Program Utama **(1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**”, kemudian
- b. Program Penunjang “(1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah”  
Adapun sasaran kinerja utama Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat setelah dilaksanakannya telaah terhadap visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah **“Meningkatnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan”**, dengan indikator **“Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan”** terhadap pelayanan **Sekretariat DPRD** dalam kurun waktu 5 tahun.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT analisis, selanjutnya dengan menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Ilustrasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam menjalankan fasilitasi dan dukungan pada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, bisa digambarkan melalui fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat serta dipengaruhi faktor-faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi. Hal tersebut juga dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya, adapun dampaknya berpengaruh pada:

- a. Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik.
- b. Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat selama beberapa waktu kedepan dengan kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan:

a. Kekuatan (***strengths***)

Pada sisi *kekuatan* terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

- 1) Eksistensi lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan **penghubung** antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku egislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan;
- 2) Dukungan **anggaran** yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD;
- 3) Kemandirian dalam rangka optimalisasi **fasilitasi** terhadap Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Publik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 4) Dukungan Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar, staf sekretariat fraksi.

b. Kelemahan (***weaknesses***)

Pada sisi *kelemahan*, terdapat faktor-faktor yaitu: “Kurangunya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan terhadap peraturan perundang-undangan”.

2. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan:

a. Peluang (***Opportunities***)

Pada sisi *peluang*, terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

- 1) Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2) Tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan

bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kedewanan dan pelayanan public ke depan;

b. Tantangan/ancaman/hambatan (***Threats***)

Pada sisi tantangan/ancaman/hambatan, terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

- 1) Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat;
- 2) Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas Kedewanan secara berkesinambungan;

Meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan public dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan daerah utamanya bagi institusi/lembaga DPRD sebagai Lembaga Wakil Rakyat. Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta meminimalisir kelemahan dan ancaman, maka Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat akan mengupayakan terwujudnya tujuan-tujuan yang akan dicapai pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Berkaitan dengan kajian/analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang antara lain untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tidak dilakukan karena tidak ada keterkaitan antara Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Renstra K/L maupun Kabupaten/Kota.

Dari isu-isu penting dan peluang yang kami kemukakan di atas maka untuk tahun 2026 kami akan berusaha dan merekomendasikan dengan Memberikan pelayanan kepada DPRD dalam melaksanakan Fungsi, Tugas, Wewenang dan hak dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi ke DPRD dan berdampak kepada Visi dan Misi kepala Daerah dengan merumuskan program dan kegiatan yang akan dirumuskan/dikemukakan pada penelaahan usulan program dan kegiatan Rencana Kerja ini.

#### **2.4. Reviu Terhadap Rancangan RKPD**

Analisis kebutuhan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk program urusan maupun program pendukung. Analisis kebutuhan juga meliputi indikator kinerja yang relevan untuk kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat.

Reviu rancangan Rencana Kerja tahun 2026 berhubungan dengan kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran. Kaidah yang dimaksud adalah kesesuaian dengan standar biaya APBD, kesesuaian dengan standar harga barang dan jasa, kesesuaian dengan standar perjalanan dinas dan untuk pengadaan disesuaikan dengan dokumen RKBMD dan RKPBM, selanjutnya kesesuaian dengan Surat Edaran Gubernur. Untuk rancangan awal RKPD tahun 2026 Sekretariat DPRD fokus pada kesesuaian pengadaan dengan RKBMD dan RKPBM dan kesesuaian dengan standar barang dan jasa.

**Tabel T-C.31**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026**  
**Provinsi Sumatera Barat**

**Nama OPD : Sekretariat DPRD**

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	SEKRETARIAT DPRD				150.678.701.013	SEKRETARIAT DPRD				236.662.779.248
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100%	99.857.127.905	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100%	103.061.048.767
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan keinerja perangkat daerah	85%	306.675.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan keinerja perangkat daerah	85%	364.413.049
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	104.915.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	132.471.889
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	65.880.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	73.904.160
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	135.880.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	158.037.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	14.590.907.663	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	14.616.094.787
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sumatera Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang	13.509.225.163	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sumatera Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang	13.053.076.132

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10000 Dokumen	971.882.500	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10000 Dokumen	1.401.174.775
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	109.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	161.843.880
3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>1.033.702.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>622.246.600</b>
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	997.592.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	583.875.600
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	22.610.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	24.871.000
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Dokumen	13.500.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Dokumen	13.500.000
4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>111.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>111.000.000</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sumatera Barat	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	174 Paket	111.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sumatera Barat	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	174 Paket	111.000.000
5	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>9.745.143.976</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>9.623.901.870</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sumatera Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	90.697.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sumatera Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	99.766.700
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumatera Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	99.800.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumatera Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	109.780.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sumatera Barat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	1.540.575.164	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sumatera Barat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	106.649.070
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumatera Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.200.772.912	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sumatera Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.210.425.700
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumatera Barat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	518.036.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumatera Barat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	820.085.200
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	22 Dokumen	250.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	22 Dokumen	494.433.720
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.476.100.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.623.710.000
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2400 Laporan	2.837.822.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2400 Laporan	4.396.040.000
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	625 Dokumen	87.840.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	625 Dokumen	51.311.480
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	643.500.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	711.700.000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	3.412.583.235	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	3.919.576.352
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sumatera Barat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	400.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sumatera Barat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	400.000.000
3	Pengadaan Mebel	Sumatera Barat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1.010.025.056	Pengadaan Mebel	Sumatera Barat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1.149.978.500
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumatera Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	263 Unit	1.300.365.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumatera Barat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	263 Unit	1.597.340.345
6	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sumatera Barat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	75.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sumatera Barat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	82.344.900

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sumatera Barat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	191.907.900	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sumatera Barat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	211.098.800
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sumatera Barat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	435.285.279	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sumatera Barat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	478.813.807
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	17.268.821.306	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	18.216.882.200
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	113.126.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	124.438.600
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.861.841.840	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.881.396.100
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.697.772.216	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.867.550.300
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.596.081.250	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.343.497.200
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	9.270.855.325	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %	9.123.945.930
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sumatera Barat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	149.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sumatera Barat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	164.450.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sumatera Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	998.700.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sumatera Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	1.112.644.500
3	Pemeliharaan Mebel	Sumatera Barat	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	413.000.000	Pemeliharaan Mebel	Sumatera Barat	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	227.150.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumatera Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	168.040.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sumatera Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	184.844.000
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sumatera Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.911.364.228	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sumatera Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.302.501.500
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sumatera Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.257.551.996	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sumatera Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.042.576.800
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sumatera Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.372.699.101	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sumatera Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.089.779.130
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	65 orang	43.398.996.600	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	65 orang	45.653.205.930
1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	65/14 Orang/Bulan	41.713.806.600	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	65/14 Orang/Bulan	43.799.496.930
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	65 Paket	1.486.940.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	65 Paket	1.635.634.000
3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65 Orang	198.250.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65 Orang	218.075.000
10	Layanan Administrasi DPRD		Persentase Adminstras DPRD yang dapat difasilitasi dengan baik	100 %	718.442.800	Layanan Administrasi DPRD		Persentase Adminstras DPRD yang dapat difasilitasi dengan baik	100 %	809.782.050
1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	65 Dokumen	16.470.000	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	65 Dokumen	26.553.450
2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	8 Laporan	95.160.000	Fasilitasi Fraksi DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	8 Laporan	104.676.000
3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	143.400.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	157.740.000

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	463.412.800	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	520.812.600
2,	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>		<b>Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi</b>	<b>100 %</b>	<b>50.821.573.108</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>		<b>Persentase Penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD yang difasilitasi</b>	<b>100 %</b>	<b>133.601.730.481</b>
1	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang Difasilitasi	100 %	8.254.729.867	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang Difasilitasi	100 %	31.362.358.610
1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	17 Dokumen	1.473.531.200	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	17 Dokumen	1.620.884.320
2	Pembahasan Rancangan Perda	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	8 Dokumen	5.191.363.767	Pembahasan Rancangan Perda	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	8 Dokumen	7.703.754.300
3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6 Dokumen	367.167.000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6 Dokumen	403.883.700
4	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen	352.746.000	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen	388.020.600
5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	819.921.900	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	901.914.090
6	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Sumatera Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	78.000 Orang	50.000.000	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Sumatera Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	78.000 Orang	20.343.901.600
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Difasilitasi	100 %	4.095.912.500	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Difasilitasi	100 %	8.119.441.800
1	Pembahasan KUA dan PPAS	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	890.046.500	Pembahasan KUA dan PPAS	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1.663.257.500
2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	590.640.200	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1.663.057.500

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	Pembahasan APBD	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	838.583.300	Pembahasan APBD	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1.553.126.300
4	Pembahasan Perubahan APBD	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	864.016.700	Pembahasan Perubahan APBD	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	1.627.969.700
5	Pembahasan Laporan Semester	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	89.031.700	Pembahasan Laporan Semester	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	89.031.700
6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	823.594.100	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1.522.999.100
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persetase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi	100 %	5.146.747.024	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persetase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi	100 %	15.072.033.713
1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3 Laporan	763.154.300	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3 Laporan	2.099.618.088
2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 Laporan	846.078.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3.034.002.400
3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 Laporan	828.803.900	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 Laporan	2.806.381.600
4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 Laporan	847.552.800	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 Laporan	2.707.474.638
5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 Laporan	827.350.200	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 Laporan	2.708.637.488
6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	301.148.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	450.022.800
7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	201.891.800	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	313.566.800

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Sumatera Barat	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	530.768.024	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Sumatera Barat	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	952.329.900
4	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi	100 %	8.494.165.844	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi	100 %	15.153.129.605
1	Pendalaman Tugas DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	48 Dokumen	1.911.464.024	Pendalaman Tugas DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	48 Dokumen	5.139.033.953
2	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	30 Orang	2.093.680.600	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	30 Orang	2.303.048.660
3	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sumatera Barat	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8 Orang	550.547.300	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Sumatera Barat	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8 Orang	605.602.030
4	Penyusunan Program Kerja DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	1 Dokumen	428.473.920	Penyusunan Program Kerja DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	1 Dokumen	634.718.612
5	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	452 Dokumen	3.510.000.000	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	452 Dokumen	6.470.726.350
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi	100 %	15.444.145.430	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi	100 %	38.169.617.293
1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	200.120.000	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	216.129.600
2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	65 Dokumen	200.724.100	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	65 Dokumen	216.782.028
3	Pelaksanaan Reses	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	195 Dokumen	6.372.334.000	Pelaksanaan Reses	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	195 Dokumen	17.392.804.065
4	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Sumatera Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	6500 Orang	8.670.967.330	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Sumatera Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	6500 Orang	20.343.901.600
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Pelaksanaan Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik	100 %	723.981.600	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Pelaksanaan Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik	100 %	723.981.600

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen	548.669.800	Penyusunan Kode Etik DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen	548.669.800
2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	175.311.800	Pengawasan Kode Etik DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	175.311.800
7	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Pelaksanaan Fasilitasi untuk Pimpinan dan Alat Kelengkapan Kedewanan	100 %	8.661.890.843	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Pelaksanaan Fasilitasi untuk Pimpinan dan Alat Kelengkapan Kedewanan	100 %	25.001.167.860
1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	24 Dokumen	3.297.531.024	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	24 Dokumen	14.067.048.600
2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	95.546.090	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	242.261.998
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10 Dokumen	1.108.628.509	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10 Dokumen	2.430.182.720
4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	36 Dokumen	2.549.928.000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	36 Dokumen	6.490.391.600
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	3 Dokumen	1.610.257.220	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Sumatera Barat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	3 Dokumen	1.771.282.942

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam pengusulan program untuk tahun 2026 sangat dipengaruhi oleh Permendagri nomor 90 tahun 2019. Amanat tersebut memang harus dilaksanakan yang bertujuan untuk kepentingan nasional dimana salah satu tujuan dari Permendagri tersebut tidak lain adalah untuk menyeragamkan nomenklatur kegiatan dan program. Dengan dilaksanakannya penyeragaman tersebut diharapkan seluruh kegiatan dan program yang dilaksanakan bisa diukur dan diketahui keberhasilannya melalui angka-angka yang pasti.

Dapat dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat belum menerima usulan dari masyarakat program dan kegiatan yang diusulkan ini adalah murni dari Sekretariat DPRD karena untuk mendukung kelancaran tugas dalam rangka memfasilitasi tugas-tugas DPRD dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kalau diperhatikan program dan kegiatan yang diusulkanp tahun 2026 apabila dikaitkan dengan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dirasa tidak akan berpengaruh terhadap tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD karena hanya program yang berubah dalam pengusulan program tahun 2026 namun kegiatan yang disajikan masih relevan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel T-C.32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Sekretariat**

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

**NIHIL**

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan dasar penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L). Renstra-K/L merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan dari Kementerian/Lembaga dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra- K/L sebagai bagian dari perencanaan nasional harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional.

Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terkait Sekretariat DPRD mencakup aspek-aspek yang mendukung tugas dan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. RPJMN, sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, memuat tujuan dan sasaran pembangunan yang relevan dengan tugas DPRD, seperti pembentukan peraturan daerah, pengawasan APBD, dan penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sekretariat DPRD berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas DPRD tersebut melalui administrasi kesekretariatan dan keuangan, serta penyediaan tenaga ahli yang diperlukan

Kebijakan RPJMN terkait Sekretariat DPRD bertujuan untuk memastikan bahwa DPRD dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sekretariat DPRD, sebagai unsur pelayanannya, memiliki peran penting dalam mendukung tugas DPRD melalui administrasi, dukungan tenaga ahli, dan penyelenggaraan kegiatan legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Barat terkait urusan Sekretariat DPRD memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan dan fasilitasi

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi budgeting. Dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan fungsi Anggota DPRD maka ukuran indikator kinerja yang digunakan adalah kepuasan pemangku kepentingan dalam hal ini adalah Anggota DPRD serta masyarakat yang mengunjungi DPRD.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

Tujuan adalah merupakan suatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang tepat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, maka dalam sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025–2029 merupakan salah satu OPD pelaksana Misi ke-8 yaitu: **“Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik Yang Efektif”** dengan tujuan RPJMD **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Tranparan, dan Pelayanan Publik Yang Efektif”** dan sasaran RPJMD **“Meningkatnya kualitas layanan publik dan kinerja keuangan daerah”**.

**Tujuan** mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang tepat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai di masa yang akan datang telah diformulasikan berdasarkan tahun-tahun sebelumnya dan tertuang di dalam Rencana Strategis. Telah selanjutnya menghasilkan tujuan Rencana Kerja yang akan disusun adalah **“Terwujudnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan”**

**Sasaran** yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat baik dalam pencapaian tata kelola tugas-tugas kesekretariatan dan fungsinya pada fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka sasaran yang telah ditetapkan adalah **“Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD”**

Adapun Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah pada Tahun 2026 sesuai dengan tabel 3.1. dibawah ini:

**Tabel 3.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2026**

<b>No.</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Capaian Tahun 2024</b>	<b>Target Tahun 2025</b>	<b>Target Tahun 2026</b>
1.	Terwujudnya Pelayanan Kepada Pemangku Kepentingan	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	91,34	91,34	91,35

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat disusun sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang struktur organisasi.

Arah dan kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan, maka ditetapkan kebijakakan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi dan peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan terdahulu yang telah dilakukan dan mengantisipasi terjadinya perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat
2. Melakukan evaluasi terhadap SDM dan pemetaan potensi personil dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran tugas dalam memfasilitasi kegiatan Dewan.
3. Melaksanakan hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dan perangkatnya serta Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
4. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan agar kualitas sarana dan prasarana selalu dalam kondisi prima.
5. Melaksanakan bimtek dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang lebih baik

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah yang didukung oleh tujuan dan sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat maka Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mengusulkan dan merencanakan program dan kegiatan yang sebagai berikut :

Tabel T-C.33

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

NO	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SEKRETARIAT DPRD				150.678.701.013				149.169.655.878
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				150.678.701.013				149.169.655.878
	4.02	SEKRETARIAT DPRD				150.678.701.013				149.169.655.878
1,	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi Persentase penyelenggaraan administrasi umum DPRD yang difasilitasi		100%	99.857.127.905			100%	101.354.984.824
					100%				100%	
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan keinerja perangkat daerah		85%	306.675.000			85%	338.577.654
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumatera Barat	6 Dokumen	104.915.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Dokumen	115.829.052
	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumatera Barat	3 Laporan	65.880.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	72.733.336
	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Barat	4 Laporan	135.880.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	150.015.266
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		100 %	14.590.907.663			100 %	15.031.040.303

NO	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sumatera Barat	89 Orang/ Bulan	13.509.225.163	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		89 Orang/ Bulan	13.836.832.998
	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sumatera Barat	10000 Dokumen	971.882.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10000 Dokumen	1.072.985.078
	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Sumatera Barat	12 Laporan	109.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	121.222.227
	<b>4.02.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah</b>		<b>100 %</b>	<b>1.033.702.000</b>			<b>100 %</b>	<b>642.439.510</b>
	4.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sumatera Barat	12 Laporan	997.592.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	602.573.075
	4.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Sumatera Barat	12 Laporan	22.610.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	24.962.063
	4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sumatera Barat	12 Dokumen	13.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	14.904.372
	<b>4.02.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah</b>		<b>100 %</b>	<b>111.000.000</b>			<b>100 %</b>	<b>122.547.060</b>
	4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Sumatera Barat	199 Stel	111.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		148 Paket	122.547.060
	<b>4.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>100 %</b>	<b>9.745.143.976</b>			<b>100 %</b>	<b>8.888.233.617</b>
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sumatera Barat	20 Paket	90.697.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Paket	100.131.988

NO	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sumatera Barat	5 Paket	99.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	110.181.951
	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sumatera Barat	7 Paket	1.540.575.164	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Paket	930.549.878
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sumatera Barat	85 Paket	2.200.772.912	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		85 Paket	1.329.327.522
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sumatera Barat	20 Paket	518.036.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Paket	571.926.580
	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sumatera Barat	22 Dokumen	250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22 Dokumen	276.006.893
	4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sumatera Barat	1280 Laporan	1.476.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1280 Laporan	1.629.655.101
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumatera Barat	2400 Laporan	2.837.822.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2400 Laporan	3.133.034.179
	4.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sumatera Barat	625 Dokumen	87.840.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		625 Dokumen	96.977.782
	4.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sumatera Barat	2 Dokumen	643.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	710.441.743
	<b>4.02.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan</b>		<b>100 %</b>	<b>3.412.583.235</b>			<b>100 %</b>	<b>3.325.974.959</b>
	4.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sumatera Barat	1 Unit	400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sumatera Barat	15 Paket	1.010.025.056	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15 Paket	1.115.095.512

NO	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sumatera Barat	10 Unit	1.300.365.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	1.435.638.816
	4.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sumatera Barat	1 Unit	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	82.802.068
	4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sumatera Barat	2 Unit	191.907.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	211.871.613
	4.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sumatera Barat	1 Unit	435.285.279	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	480.566.950
	<b>4.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>100 %</b>	<b>17.268.821.306</b>			<b>100 %</b>	<b>19.065.254.890</b>
	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumatera Barat	12 Laporan	113.126.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	124.894.223
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sumatera Barat	12 Laporan	2.861.841.840	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	3.159.552.303
	4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sumatera Barat	20 Laporan	1.697.772.216	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20 Laporan	1.874.387.340
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sumatera Barat	13 Laporan	12.596.081.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13 Laporan	13.906.421.024
	<b>4.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik</b>		<b>100 %</b>	<b>9.270.855.325</b>			<b>100 %</b>	<b>8.739.157.191</b>
	4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Sumatera Barat	7 Unit	149.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Unit	165.052.122

NO	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sumatera Barat	57 Unit	998.700.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		57 Unit	1.102.592.338
	4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Sumatera Barat	60 Unit	413.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60 Unit	249.463.388
	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sumatera Barat	110 Unit	168.040.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		110 Unit	185.520.793
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sumatera Barat	1 Unit	3.911.364.228	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	3.028.631.239
	4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sumatera Barat	1 Unit	2.257.551.996	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	2.492.399.653
	4.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sumatera Barat	2 Unit	1.372.699.101	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	1.515.497.658
	<b>4.02.01.1.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD</b>		<b>65 orang</b>	<b>43.398.996.600</b>			<b>65 orang</b>	<b>44.408.578.958</b>
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Sumatera Barat	65 Orang/ Bulan	41.713.806.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		65 Orang/ Bulan	42.548.082.732
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Sumatera Barat	65 Paket	1.486.940.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		65 Paket	1.641.622.760
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Sumatera Barat	65 Orang	198.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		65 Orang	218.873.466
	<b>4.02.01.1.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase Administras DPRD yang dapat difasilitasi dengan baik</b>		<b>100 %</b>	<b>718.442.800</b>			<b>100 %</b>	<b>793.180.682</b>

NO	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	4.02.01.1.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Sumatera Barat	65 Dokumen	16.470.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	65 Dokumen	18.183.334	
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Sumatera Barat	7 Laporan	95.160.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Laporan	105.059.263	
	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sumatera Barat	24 Laporan	143.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24 Laporan	158.317.554	
	4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Sumatera Barat	12 Paket	463.412.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	511.620.531	
2,	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Ketepatan penetapan perda APBD Tahun N		2	50.821.573.108		2	47.814.671.054	
			Persentase penetapan ranperda Tahun N		62%			62%		
			Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan		100%			100%		
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang Difasilitasi		100 %	8.254.729.867		100 %	8.608.800.063	
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sumatera Barat	1 Dokumen	1.473.531.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	1.587.817.215	
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Sumatera Barat	17 Dokumen	5.191.363.767	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17 Dokumen	4.594.002.127	
	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Sumatera Barat	6 Dokumen	367.167.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Dokumen	395.644.202	
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Sumatera Barat	6 Dokumen	352.746.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Dokumen	380.104.720	
	4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Sumatera Barat	1 Dokumen	819.921.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	883.514.440	

NO	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Sumatera Barat	6500 Orang	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6500 Orang	767.717.359
	<b>4.02.02.1.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Difasilitasi</b>		<b>100 %</b>	<b>4.095.912.500</b>			<b>100 %</b>	<b>4.413.588.462</b>
	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Sumatera Barat	1 Dokumen	890.046.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	959.077.852
	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sumatera Barat	1 Dokumen	590.640.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	636.449.820
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Sumatera Barat	1 Dokumen	838.583.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	903.623.204
	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Sumatera Barat	1 Dokumen	864.016.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	931.029.200
	4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Sumatera Barat	1 Dokumen	89.031.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	95.936.933
	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sumatera Barat	1 Dokumen	823.594.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	887.471.453
	<b>4.02.02.1.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi</b>		<b>100 %</b>	<b>5.146.747.024</b>			<b>100 %</b>	<b>5.545.924.938</b>
	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Sumatera Barat	3 Laporan	763.154.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	822.343.986
	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Sumatera Barat	3 Laporan	846.078.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	911.699.188

NO	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sumatera Barat	3 Laporan	828.803.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	893.085.321
	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Sumatera Barat	3 Laporan	847.552.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	913.288.372
	4.02.02.1.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Sumatera Barat	3 Laporan	827.350.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	891.518.873
	4.02.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Sumatera Barat	2 Dokumen	301.148.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	324.504.817
	4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Sumatera Barat	1 Dokumen	201.891.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	217.550.379
	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Sumatera Barat	1 Dokumen	530.768.024	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	571.934.002
	<b>4.02.02.1.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi</b>		<b>100 %</b>	<b>8.494.165.844</b>			<b>100 %</b>	<b>5.964.834.732</b>
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Sumatera Barat	48 Dokumen	1.911.464.024	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		48 Dokumen	1.059.715.769
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Sumatera Barat	30 Orang	2.093.680.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30 Orang	1.110.632.600
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Sumatera Barat	7 Orang	550.547.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Orang	550.547.300
	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Sumatera Barat	2 Dokumen	428.473.920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	461.706.042

NO	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Sumatera Barat	452 Dokumen	3.510.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		452 Dokumen	2.782.233.021
	<b>4.02.02.1.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi</b>		<b>100 %</b>	<b>15.444.145.430</b>			<b>100 %</b>	<b>13.167.689.047</b>
	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Sumatera Barat	390 Laporan	200.120.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		390 Laporan	215.641.160
	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Sumatera Barat	65 Dokumen	200.724.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		65 Dokumen	216.292.113
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Sumatera Barat	195 Dokumen	6.372.334.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		195 Dokumen	5.392.274.587
	4.02.02.1.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Sumatera Barat	6500 Orang	8.670.967.330	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6500 Orang	7.343.481.187
	<b>4.02.02.1.06</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik</b>		<b>100 %</b>	<b>723.981.600</b>			<b>100 %</b>	<b>780.133.080</b>
	4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Sumatera Barat	2 Dokumen	548.669.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	591.224.226
	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Sumatera Barat	3 Laporan	175.311.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	188.908.854
	<b>4.02.02.1.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Fasilitasi untuk Pimpinan dan Alat Kelengkapan Kedewan</b>		<b>100 %</b>	<b>8.661.890.843</b>			<b>100 %</b>	<b>9.333.700.732</b>
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sumatera Barat	24 Dokumen	3.297.531.024	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Dokumen	3.553.285.108
	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Sumatera Barat	1 Laporan	95.546.090	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	102.956.574

NO	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sumatera Barat	10 Dokumen	1.108.628.509	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Dokumen	1.194.612.921
	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Sumatera Barat	36 Dokumen	2.549.928.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36 Dokumen	2.747.698.542
	4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Sumatera Barat	3 Dokumen	1.610.257.220	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	1.735.147.587

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN**  
**PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada tahun 2026 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merencanakan 2 (dua) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 17 (tujuh belas) kegiatan dan sub kegiatan sebanyak 83 (delapan puluh tiga) sub kegiatan, dengan jumlah plafon dana sebesar Rp. 145.721.462.816,- (Seratus Empat Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah). Plafon anggaran tersebut merupakan pagu berdasarkan data Rencana Strategis tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yang dipisah dalam dua program yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan anggaran sebesar Rp.66.609.380.676,- dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 79.112.082.140,-. Rincian dari ke dua program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Pagu Indikatif Tahun 2026**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Anggaran Tahun 2026	
			Target Keluaran	Pagu Indikatif (Rp.)
	SEKRETARIAT DPRD			150.678.701.013
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			150.678.701.013
4.02	SEKRETARIAT DPRD			150.678.701.013
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		100%	99.857.127.905
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan keinerja perangkat daerah	85%	306.675.000
4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	104.915.000
4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	65.880.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Anggaran Tahun 2026	
			Target Keluaran	Pagu Indikatif (Rp.)
4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	135.880.000
<b>4.02.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Keuangan</b>	<b>100 %</b>	<b>14.590.907.663</b>
4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/ Bulan	13.509.225.163
4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10000 Dokumen	971.882.500
4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	109.800.000
<b>4.02.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>1.033.702.000</b>
4.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Laporan	997.592.000
4.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	22.610.000
4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Dokumen	13.500.000
<b>4.02.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>111.000.000</b>
4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	199 Stel	111.000.000
4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	<b>9.745.143.976</b>
<b>4.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>90.697.000</b>
4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	99.800.000
4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.540.575.164
4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	2.200.772.912
4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	85 Paket	518.036.500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Anggaran Tahun 2026	
			Target Keluaran	Pagu Indikatif (Rp.)
4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	250.000.000
4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	22 Dokumen	1.476.100.000
4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1280 Laporan	2.837.822.400
4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2400 Laporan	87.840.000
4.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	625 Dokumen	643.500.000
4.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	<b>3.412.583.235</b>
<b>4.02.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan</b>	<b>100 %</b>	400.000.000
4.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1.010.025.056
4.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.300.365.000
4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket	75.000.000
4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	191.907.900
4.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	435.285.279
4.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	<b>17.268.821.306</b>
4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	113.126.000
4.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.861.841.840
<b>4.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100 %</b>	1.697.772.216
4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.596.081.250
4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	<b>9.270.855.325</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Anggaran Tahun 2026	
			Target Keluaran	Pagu Indikatif (Rp.)
4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan	149.500.000
4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	998.700.000
<b>4.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik</b>	<b>100 %</b>	413.000.000
4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	168.040.000
4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit	3.911.364.228
4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	60 Unit	2.257.551.996
4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit	1.372.699.101
4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	<b>43.398.996.600</b>
4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	41.713.806.600
4.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.486.940.000
<b>4.02.01.1.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD</b>	<b>65 orang</b>	198.250.000
4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	65 Orang/ Bulan	<b>718.442.800</b>
4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	65 Paket	16.470.000
4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65 Orang	95.160.000
<b>4.02.01.1.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase Administras DPRD yang dapat difasilitasi dengan baik</b>	<b>100 %</b>	143.400.000
4.02.01.1.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	65 Dokumen	463.412.800
4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	7 Laporan	<b>50.821.573.108</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Anggaran Tahun 2026	
			Target Keluaran	Pagu Indikatif (Rp.)
4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	24 Laporan	<b>8.254.729.867</b>
4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	1.473.531.200
<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>		<b>100 %</b>	5.191.363.767
<b>4.02.02.1.01</b>	<b>Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>	<b>Persentase Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang Difasilitasi</b>	<b>100 %</b>	367.167.000
4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	352.746.000
4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	17 Dokumen	819.921.900
4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6 Dokumen	50.000.000
4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	6 Dokumen	<b>4.095.912.500</b>
4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	890.046.500
4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	6500 Orang	590.640.200
<b>4.02.02.1.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Difasilitasi</b>	<b>100 %</b>	838.583.300
4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	864.016.700
4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	89.031.700
4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	823.594.100
4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	<b>5.146.747.024</b>
4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	763.154.300
4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	846.078.000
<b>4.02.02.1.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang difasilitasi</b>	<b>100 %</b>	828.803.900

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Anggaran Tahun 2026	
			Target Keluaran	Pagu Indikatif (Rp.)
4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3 Laporan	847.552.800
4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 Laporan	827.350.200
4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3 Laporan	301.148.000
4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 Laporan	201.891.800
4.02.02.1.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 Laporan	530.768.024
4.02.02.1.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	<b>8.494.165.844</b>
4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	1.911.464.024
4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	2.093.680.600
<b>4.02.02.1.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD yang difasilitasi</b>	<b>100 %</b>	550.547.300
4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	48 Dokumen	428.473.920
4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30 Orang	3.510.000.000
4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	<b>15.444.145.430</b>
4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2 Dokumen	200.120.000
4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen	200.724.100
4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	452 Dokumen	6.372.334.000
<b>4.02.02.1.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi</b>	<b>100 %</b>	8.670.967.330

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Anggaran Tahun 2026	
			Target Keluaran	Pagu Indikatif (Rp.)
4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	390 Laporan	<b>723.981.600</b>
4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	65 Dokumen	548.669.800
4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	195 Dokumen	175.311.800
4.02.02.1.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	6500 Orang	<b>8.661.890.843</b>
<b>4.02.02.1.06</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Penyusunan dan Pengawasan Kode Etik</b>	<b>100 %</b>	3.297.531.024
4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dokumen	95.546.090
4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	1.108.628.509
<b>4.02.02.1.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Fasilitasi untuk Pimpinan dan Alat Kelengkapan Kedewanan</b>	<b>100 %</b>	2.549.928.000
4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	24 Dokumen	1.610.257.220
4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	166.042.180
4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10 Dokumen	2.209.257.018
4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	36 Dokumen	3.154.531.810
4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	3 Dokumen	2.139.822.500

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) OPD Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 merupakan suatu acuan atau pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD tahun 2026. Untuk penyusunan rencana kerja 2026 berpedoman kepada Rancangan Akhir Rencana Kerja 2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, hasil evaluasi rencana kerja tahun lalu dan evaluasi renja tahun berjalan. Sekretariat DPRD merupakan OPD yang melaksanakan Misi ke 8 yaitu **Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik Yang Efektif**. Untuk melaksanakan misi tersebut, Sekretariat DPRD berurusan langsung dengan Sasaran II yakni **Meningkatnya kualitas layanan publik dan kinerja keuangan daerah** pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Oleh sebab itu Sekretariat DPRD selalu berusaha melaksanakan sinkronisasi terhadap hasil evaluasi rencana kerja tahun lalu dan beberapa aturan yang mengikat seperti penetapan nomenklatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Melalui Rencana Kerja (Renja) diharapkan akan terjadi pelaksanaan kegiatan yang terencana dan konsisten hingga ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Anggaran tahun 2026 ditetapkan. Melalui rancangan rencana kerja ini pula diharapkan terjadi sinkronisasi dan sinergis antar bagian dalam unit kerja organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dan atau dengan Dinas, Badan, Lembaga, dalam bentuk penyelenggaraan tugas dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tuntutan masyarakat, dengan harapan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan semua tingkatan dalam unit organisasi Sekretariat DPRD

Provinsi Sumatera Barat. Untuk dapat menjadi perhatian kita bersama bahwa usulan program dan kegiatan ini adalah merupakan usulan program dari masing-masing pemangku kepentingan (Bagian) di DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD dalam pelaksanaan pemerintahan di Daerah Sumatera Barat. Oleh sebab itu kami berharap usulan program dan kegiatan ini perlu menjadi perhatian semua pihak untuk dapat direalisasi dalam Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah tahun 2026 karena program dan kegiatan yang diajukan ini adalah menyangkut kepentingan bersama dalam mendukung visi dan misi kepada daerah dan menunjang tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Demikian harapan kita agar Rencana Kerja (Renja) ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan berikutnya sehingga tercipta konsistensi dalam penyusunan rencana kerja hingga anggaran tahun 2026 ditetapkan.

Padang, Mei 2025

Pt. Sekretaris DPRD  
Provinsi Sumatera Barat



**Drs. MAFRIZON, M.Si**  
Pembina Utama Madya

NIP. 19680513 199512 1 005